

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP–PRINSIP GOOD GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA ORGANISASI
(Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Surbakti, Kabupaten Karo)**

Oleh:

**Drs. Maringan Panjaitan, M.Si dan Linda Tamara Purba
(Dosen Administrasi Publik Fisipol UHN Medan)**

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi. Variabel untuk mengukur dimensi good governance adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stake holder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, keefektifitasan dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Variabel pengukuran untuk mengukur kinerja organisasi adalah penggunaan waktu dalam bekerja, responsibilitas, responsivitas, dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket dengan jumlah reponden sebanyak 100 orang. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kepala Desa Surbakti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance memiliki hubungan dengan kinerja organisasi. Ini menunjukkan hubungan dimana adanya hubungan positif antara penerapan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja organisasi, dimana taraf signifikan 5% adalah dengan nilai hitung $3,949 > 1,99$. Sementara koefisien determinan diperoleh sebesar 21,1% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diperhitungkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Good Governance dan Kinerja Organisasi

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah terutama daerah– daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tersebut. Pada saat ini terjadi krisis, ada wacana yang menyebutkan bahwa asal mula krisis adalah kurangnya kualitas “governansi” atau *governance* kita baik disektor publik maupun disektor bisnis. Bertolak dari reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel. Maka tuntunan akan adanya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi relevan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemimpinan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “*good governance*” (kepemerintahan yang baik) agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan

dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat.

Untuk mewujudkan *good governance* tentunya tidak semudah yang dipikirkan. Untuk mewujudkan *good governance* sangat memerlukan proses dan dukungan masyarakat yang mengacu pada sebuah pemahaman perubahan guna tercapainya *good governance* dalam birokrasi pemerintah. Sebagai organisasi sektor publik, pegawai dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut.

Good governance merupakan isu dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah adalah sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi, maka kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat kepada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam hal tersebut, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berguna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Keberlangsungan suatu organisasi dapat dilihat dari baik buruknya kinerja dari organisasi tersebut, organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang aktif dalam mencapai tujuan yang sebelumnya ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini pegawai sebagai motor (penggerak) bagi berjalannya organisasi tersebut maka dari itu secara tidak langsung mereka yang berperan terhadap kemajuan atau kemunduran organisasi tersebut.

Seiring dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan seharusnya menjadi dasar kepada penggunaan sistem pemerintahan yang lebih menunjang dalam meningkatkan kinerja dari pegawai itu sendiri dalam hal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Di dalam mengukur kinerja pegawai maka terlebih dahulu menentukan apa saja yang menjadi metode yang terkait dalam mengukur kinerja pegawai. Dimensi pekerjaan yang dapat mengambil satu atau tiga bentuk, yaitu tanggungjawab atau kewajiban, perilaku dan sifat. Secara umum dimensi kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dengan diterapkan hal ini dalam organisasi dapat menjadi acuan pada

pegawai agar dapat menciptakan kinerja yang mampu memotivasi sehingga dapat membangun diri mereka untuk menjadi pegawai yang lebih baik lagi.

Kinerja pegawai yang mencerminkan prinsip *good governance* dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap kinerja pegawai, bahwa setiap kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, keefektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Banyak masalah-masalah yang ditemukan dalam hal memberikan pelayanan publik. Bisa saja masalah kinerjanya sehingga prinsip *good governance* tersebut masih belum tercapai didalam suatu organisasi. Oleh sebab itu pelayanan publik saat ini memiliki berbagai kelemahan, yaitu kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, kurang birokratis, kurang mau mendengar keluhan, saran dan aspirasi masyarakat, kurang inefisien, sehingga diperlukan peran pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang hadir sebagai bagian utama dari agenda informasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Kinerja merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, oleh karena itu hasil dari

pekerjaan yang telah dikerjakan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam suatu pekerjaan. Kantor Kepala Desa Surbakti, Kabupaten Karo sebagai salah satu instansi pemerintahan yang penyedia pelayanan publik tentunya diharapkan dapat menyediakan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat di Desa Surbakti. Untuk melakukan hal tersebut tentunya harus memiliki visi yang jelas agar tujuannya dapat tercapai secara maksimal. Cara pandang jauh kedepan, di mana instansi pemerintahan harus dibawa agar eksis, antisipatif, dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kepala Desa Surbakti. Penetapan visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen di lingkungan Desa Surbakti.

Baik buruknya kinerja para aparatur pemerintahan dapat dapat ditentukan oleh faktor, namun faktor yang dijadikan pertimbangan ada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan komitmen organisasi. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa ada sembilan (9) faktor *good governance* yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana sembilan prinsip-prinsip *good governance* dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan membandingkan satu per satu prinsip-prinsip tersebut. Konsep *good governance* memiliki pengaruh dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Oleh karena itu respon terhadap *good governance* ini sangat tinggi dan kinerja organisasi pun harus cukup baik dalam hal ini. Jika penerapan prinsip-prinsip *good governance* sudah terlaksana

dengan baik, maka kinerja dari organisasi akan baik pula dan begitu sebaliknya saling adanya pengaruh antara *good governance* terhadap kinerja.

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Surbakti, Kabupaten Karo)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini agar penelitian ini memiliki arah yang jelas menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Apakah Ada Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kinerja organisasi di Kantor Kepala Desa Surbakti, Kabupaten Karo dengan melihat satu persatu masing-masing prinsip – prinsip *good governance* dan melihat prinsip mana yang lebih kuat pengaruhnya terhadap kinerja organisasi.

Pembahasan

Menurut UNDP “(*United Nation Development Program*) dalam (LAN dan BPKP 2000,7) mengemukakan

bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut :

1. *Participation* (Partisipasi Masyarakat)
2. *Rule of law* (Tegaknya Supremasi Hukum)
3. *Transparency* (Transparansi)
4. *Responsiveness* (Peduli Pada Stake Holder)
5. *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Konsensus)
6. *Equity* (Kesetaraan)
7. *Effectiveness and efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi)
8. *Accountability* (Akuntabilitas)
9. *Strategic Vision* (Visi Strategis)”

UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai “*The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels*”. Dari pengertian tersebut, secara fungsional aspek-aspek *good governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi.

Berdasarkan defenisi terakhir ini, *good governance* mempunyai tiga kaki (*threelegs*), yaitu:

1. “*Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi.
2. *Political governance* adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi/penyusunan kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan”.

Selain pengertian di atas good governance dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
2. *Administrative competence and tranparency.* Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrasi serta keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penerapan prinsip-prinsip good governance (X) dengan kinerja organisasi (Y), maka dapat dilihat dengan menggunakan uji hipotesis maka digunakan rumus "t" dan selanjutnya untuk melihat seberapa pengaruh yang diberikan antara penerapan prinsip-prinsip good governance (X) terhadap kinerja organisasi (Y), maka digunakan rumus koefisien determinasi.

Dalam menguji suatu kajian ini dengan membandingkan satu persatu antara prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi. Dimana terdapat 9 (sembilan) prinsip. Prinsip-prinsip tersebut sudah dijelaskan secara teori didalam bab 2.

Pertama dalam hal uji hipotesis yaitu uji "t" dalam mencari suatu hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Disini juga bisa melihat variabel mana yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja organisasi. Dalam masing-masing suatu variabel yang memiliki pengaruh paling kuat adalah variabel X4 terhadap Y. Dimana variabel X4 adalah peduli pada stake holder. Dari antara sembilan variabel X yang paling kuat pengaruhnya terhadap kinerja. Penjelasan lebih rinci (Tabel 5.37). Pengaruh variabel X yang paling kecil terhadap kinerja adalah tegaknya supremasi hukum (X2) terhadap kinerja organisasi. Hasil lebih rinci bisa melihat pada tabel hasil pengolahan SPSS (Tabel 5.35).

Pada variabel X lainnya ada juga yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi yaitu partisipasi masyarakat (X1), berorientasi pada konsensus (X5), kesetaraan (X6), dan efektifitas dan efisiensi.(X7). Alasan setiap masing-masing sudah ada dijelaskan pada pembahasan di uji parsial.

Pada variabel X lainnya yang juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi yaitu transparansi (X3) , akuntabilitas (X8), dan visi strategis (X9). Keterangan setiap pengaruh terdapat pada data yang diolah SPSS mengenai Uji Parsial.

Terlihat pada penjelasan diatas lebih banyak variabel X yang tidak mempunyai pengaruh terhadap Y. Maka pada uji koefisien determinasi tingkat besar kontribusinya sangat kecil dengan nilai 21,1%.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good

Governance Terhadap Kinerja Organisasi di Kantor Kepala Desa Surbakti, Kabupaten Karo. Dapat disimpulkan bahwa, pegawai Kantor Kepala Desa Surbakti telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Sesuai data dari hasil uji hipotesis menggunakan tiga metode analisis (uji parsial, uji simultan, dan uji determinasi), dapat disimpulkan bahwa variabel Good Governance (X) memiliki pengaruh signifikan dengan Kinerja Organisasi (Y) secara positif dengan tingkat signifikan yang berbeda-beda dan tingkat hubungan yang berbeda-beda.

1. Uji Parsial

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS hubungan antara variabel X terhadap Y adalah

- Transparansi (X3)
- Peduli Pada Stake Holder (X4)
- Akuntabilitas (X8)
- Visi Strategis (X9)

Variabel X yang tidak memiliki pengaruh terhadap Y adalah

- Partisipasi Masyarakat (X1)
- Tegaknya Supremasi Hukum (X2)
- Berorientasi Pada Konsensus (X5)
- Kesetaraan (X6)
- Efektifitas dan Efisiensi (X7)

2. Uji Simultan (F)

Berdasarkan pengolahan data SPSS menunjukkan bahwa Variabel bebas adalah penjelas yang signifikan terhadap variabel terkait. Dengan nilai signifikan $0,000 < 0,005$ dengan nilai $F_{hitung} 3,949 > 1,99$.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS besar kontribusi antara X1-X9 terhadap Y adalah 21,1% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 78,9%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka hal-hal yang perlu disarankan adalah :

1. Pemerintah Kantor Kepala Desa Surbakti sebaiknya mempertahankan dan lebih lagi meningkatkan partisipasi masyarakat , tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, dan keefektifitas dan efisiensi karena berdasarkan hasil uji hipotesis sangat kecil hubungan signifikan yang telah diuji.
2. Sebaiknya Pemerintah Kantor Kepala Desa Surbakti perlu meneliti dan mengembangkan faktor-faktor lain yang dapat berhubungan atau memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,Edisi Kedua

Kasmir. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Depok: Rajawali Pers.Cetakan Ketiga

Mahsun, M. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*,Yogyakarta: BPFE.Cetakan Keenam

Moeheriono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Cetakan Pertama

MURP,Yeremias T. Keban P. D. 2014. *Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media. Edisi Ketiga

Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*, Darussalam: Ghalia Indonesia. Edisi Ketujuh

Suaib, M. R. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: CALPULIS. Cetakan Pertama

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Mulyan, Budi *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, Medan: 2009